

Bentuk Struktur Sosial Komunitas Petani Dan Implikasinya Terhadap Diferensiasi Kesejahteraan. Studi Kasus Pada Komunitas Petani Kakao di Sulawesi Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam

The Social Structure of Peasant Community and Its Implication to Welfare Differentiation.

A case Study on Cocoa Peasant Community in Central Sulawesi and Nangroe Aceh Darussalam

U. Fadjar¹⁾, M.T.F Sitorus²⁾, A.H. Dharmawan²⁾, dan S.M.P. Tjondronegoro³⁾

Ringkasan

Pengembangan tanaman komersial kakao yang berlangsung cepat telah merubah struktur agraria dari penguasaan kolektif yang bersifat egaliterian ke penguasaan perorangan yang relatif tertutup. Mengingat lahan menjadi basis kehidupan petani kakao, maka dapat diduga bahwa perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan struktur sosial komunitas petani kakao. Penelitian ini bermaksud menganalisis realitas struktur sosial komunitas petani kakao yang muncul saat ini serta implikasinya terhadap differensiasi kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksamaan dalam penguasaan lahan yang terjadi pada komunitas petani kakao telah mendorong lahirnya bentuk struktur sosial komunitas petani dengan tipe "stratifikasi yang semakin timpang". Lebih lanjut, hadirnya struktur tersebut berimplikasi pada meningkatnya differensiasi kesejahteraan dalam komunitas petani. Dalam hal ini, komunitas petani terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu : petani kaya (lapisan atas), petani sedang (lapisan menengah), dan petani miskin (lapisan bawah). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di luar Jawa yang memiliki tingkat kepadatan agraris relatif rendah ternyata petani tunakisma dan petani miskin telah muncul, dan petani miskin tidak hanya terjadi pada lapisan petani tunakisma (tanpa lahan) tetapi juga pada lapisan petani pemilik. Dengan menggunakan analisa gini *ratio*, ketimpangan pemilikan lahan pada komunitas petani kakao umumnya sudah berada pada kategori tinggi. Walaupun demikian, ketimpangan penghasilan dan ketimpangan pengeluaran komunitas tersebut masih berada pada kategori rendah.

1) Peneliti (*Researcher*), Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Jl. Salak No. 1, Bogor - Indonesia.

2). Dosen (*Lecturer*), Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, Bogor - Indonesia.

3). Guru Besar (*Professor*), Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, Bogor - Indonesia.

Summary

The development of commercial crop cocoa have altered the structure of agrarian : from collective owners to individual owners. For the cocoa peasant communities, the agrarian resources are a base of their life. So, the changing of agrarian structure gives a way to changing process of the social structure community. This research means to analyze the social structure that emergence on cocoa peasant community and the implication of it to the differentiation of peasant welfare. The result of this research indicate that the inequalities of agrarian resources control on cocoa peasant communities have developed the form of peasant community social structure : "stratification which progressively unequal". Furthermore, these social structure have implication to the increasing of welfare differentiation. In this case, a cocoa peasant community divided to three levels, that is: rich farmer (upper level), middle farmer (middle level), and the poor farmer (low level). The result of research also indicates that on Outside Java - generally owning a lower agrarian density – the landless and he poor farmer have been occur, and the poor farmer not only lay at land less farmer (tunakisma) but also on an owner farmer. Base on gini ratio analysis, the equality of agrarian resource ownership generally have resided in high level. Even though, the equality of farmer household income and farmer household expenditure generally have resided in low level.

Key words: social structure, welfare differentiation, peasant, cocoa.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, pengembangan kebun kakao yang dilakukan para petani berlangsung relatif cepat. Hal ini terjadi selain karena tersedianya pasar yang menampung hasil kebun kakao juga selama ini tanaman kakao dapat dikembangkan dengan cara yang relatif mudah dan murah. Para petani umumnya menanam kakao hanya menggunakan sumberdaya lokal sehingga mereka hanya sedikit memerlukan modal finansial. Selain itu, tanaman kakao cocok ditanam pada berbagai ketinggian. Oleh sebab itu, pengembangan usahatani kakao yang cepat telah menggusur "sistem perladangan berpindah" (*shifting cultivation*) di lahan kering dan digantikan oleh "sistem pertanian menetap" (*suddentary cultivation*),

dan sistem pertanian menetap yang mengusahakan tanaman kakao merupakan sistem yang "permanen" karena umur produktif tanaman kakao relatif panjang (sekitar 30 tahun).

Bersamaan dengan perubahan sistem pertanian itu, terjadi perubahan struktur agraria, yaitu dari penguasaan kolektif (komunal) yang memberikan akses relatif terbuka dan merata bagi semua anggota komunitas ke penguasaan perorangan (individual) yang memberikan akses relatif tertutup dan cenderung tidak merata. Bagi komunitas petani kakao yang kehidupannya berbasis lahan, adanya ketidakmerataan akses dalam penguasaan sumberdaya akan memicu munculnya diferensiasi status sosial dan kemudian memberi jalan terbentuknya struktur sosial baru.

Dalam proses produksi pertanian yang dilakukan petani (termasuk petani kakao), sebagaimana dikemukakan Kautsky *dalam* Hashim (1998), lahan menjadi modal produksi penting karena di atas lahan itulah kegiatan produksi komoditas penghasil "surplus" dimulai dan kemudian lahan akan menjadi sumber penghasilan rumah tangga petani. Dengan kata lain, penguasaan lahan akan menjadi "basis kesejahteraan" anggota komunitas petani. Kebun kakao akan menjadi tumpuan masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam "memenuhi kelangsungan hidup" (*survival*) dan "membuat kehidupan yang lebih baik" (*a better living*). Oleh sebab itu, perubahan struktur sosial komunitas petani yang bertumpu pada penguasaan lahan akan turut menentukan perubahan kesejahteraan petani karena perubahan struktur tersebut akan menentukan sejauh mana petani memiliki kontrol terhadap penguasaan lahan.

Berkaitan dengan itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah "menganalisis struktur sosial komunitas petani kakao yang muncul setelah mengalami perubahan struktur agraria serta sejauh mana implikasi struktur yang ada terhadap diferensiasi kesejahteraan petani". Analisis ini penting dilakukan mengingat kebun kakao dan petani kakao di Indonesia terus bertambah. Pada tahun 2006, luas kebun kakao rakyat mencapai 1.219.633 hektar (92,3% dari total kebun kakao di Indonesia) dan jumlah petani yang mengusahakan tanaman kakao mencapai 1.237.119 rumah tangga (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007).

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Terkait dengan keberadaan lahan sebagai modal produksi, maka muncul berbagai pola hubungan sosial di antara petani agar dapat menguasai lahan. Hubungan sosial dimaksud, sebagaimana dikemukakan Shanin (1990), Russel (1989), dan Wiradi (1984), dikenal sebagai "hubungan sosial produksi" atau "hubungan penguasaan lahan". Adanya pola-pola hubungan sosial terkait penguasaan lahan selanjutnya akan membentuk struktur sosial dalam komunitas petani, baik berupa struktur penguasaan; struktur perusahaan; maupun struktur distribusi hasil pengelolaan sumber-sumber agraria. Struktur sosial komunitas petani yang terbentuk bukanlah suatu struktur yang tetap sepanjang masa, tetapi secara dinamis akan berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, termasuk berlangsungnya perubahan sistem pertanian dan struktur agraria yang dijalankan kaum tani (Shanin, 1990 dan Ray, 2002).

Melalui kegiatan produktif di atas lahan yang dikuasai, para petani berpotensi memperoleh penghasilan yang memadai dan berkelanjutan sehingga mereka dapat "memenuhi kelangsungan hidup" dan "membuat kehidupan yang lebih baik". Dengan demikian peta kesejahteraan petani yang berbasis pada lahan sangat terikat dari seberapa jauh para petani memiliki kontrol terhadap penguasaan lahan. Kemudian, mengingat kontrol petani

terhadap lahan akan ditentukan oleh bentuk penguasaan lahan yang ada, maka berlangsungnya perubahan struktur sosial komunitas petani yang berbasis pada penguasaan lahan akan berimplikasi terhadap diferensiasi kesejahteraan dalam komunitas petani.

Setelah berakhirnya penguasaan kolektif, struktur sosial komunitas petani dibangun melalui basis penguasaan perorangan. Pada masa penguasaan kolektif, semua warga komunitas memperoleh akses yang sama untuk dapat mengusahakan lahan. Sebaliknya, pada periode penguasaan perorangan tidak semua warga komunitas dapat dengan mudah memperoleh akses untuk menguasai lahan. Pada masa ini anggota komunitas yang akan menguasai lahan harus memenuhi persyaratan atau kemampuan tertentu. Bahkan, pada periode ini muncul konsep pemilikan tetap dan pemilikan sementara. Menurut Wiradi & Makali (1984), konsep pemilikan tetap menunjuk pada hubungan sosial penguasaan lahan yang memberi akses petani untuk dapat menguasai lahan secara permanen. Sementara itu, konsep penguasaan sementara menunjuk pada hubungan sosial penguasaan lahan yang memberi akses petani untuk menguasai lahan dimaksud dalam kurun waktu terbatas (sementara), misalnya melalui mekanisme bagi hasil, sewa, dan gadai.

Secara spesifik, berdasarkan hubungan sosial dalam penguasaan tanah, perubahan struktur sosial komunitas petani yang berlangsung akan merujuk pada gejala penajaman deferensiasi kelas. Diferensiasi tersebut kemudian akan membentuk struktur

komunitas petani yang semakin berlapis atau struktur semakin terpolarisasi. Pada kasus komunitas petani, Hayami dan Kikuchi (1987) mengartikan stratifikasi sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang melipatgandakan sub-kelas masyarakat agraris dalam rangkaian spektrum dari buruh tani tunakisma sampai ke tuan tanah yang tidak mengusahakan sendiri lahannya. Sementara itu, polarisasi diartikan sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang mengkutubkan masyarakat agraris menjadi (hanya) dua lapisan, yakni petani luas komersial yang kaya dan buruh tani tunakisma yang miskin.

Strategi Penelitian

Untuk memperoleh gambaran komparatif tentang perubahan realitas sosial semasa kontemporer yang terjadi pada komunitas petani dengan latar belakang berbeda, maka penelitian ini menerapkan strategi "studi kasus historis" dan "studi kasus majemuk". Sejalan dengan pendapat Newman (1997) dan Yin (2002), studi kasus menjadi pilihan strategi agar dapat memahami realitas sosial yang kompleks melalui pengumpulan data dan informasi yang lebih rinci, lebih bervariasi, lebih luas, dan lebih mendalam. Sebagai studi kasus majemuk, penelitian ini merupakan gabungan studi kasus pada empat komunitas petani berbasis usahatani kakao yang dilaksanakan secara bersamaan dengan persoalan; tujuan; dan metoda penelitian yang sama, sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan antarkasus-kasus tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kedua provinsi tersebut merupakan sentra= pengembangan kakao di wilayah Timur dan wilayah Barat Indonesia. Selain itu, riwayat pengembangan kakao di kedua provinsi relatif berbeda, bahwa pengembangan kakao rakyat di provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan lebih awal dibanding di NAD. Latar belakang spesifik lokal yang menjadi pertimbangan dalam memilih komunitas desa lokasi penelitian adalah latar belakang etnis, latar belakang migrasi, keadaan

ekologis lahan (dataran rendah atau tinggi), serta fasilitasi program pemerintah dalam pengembangan kakao rakyat. Bertolak dari pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan di empat komunitas petani, yaitu 1) Komunitas petani di desa Tondo (Sulawesi Tengah, dataran rendah, lokal, Kaili, ada program), 2) Komunitas petani di desa Jono Oge (Sulawesi Tengah, dataran rendah, pendatang, Bugis, ada program, 3) Komunitas petani di desa Cot Baroh/Tunong (NAD), dataran rendah, lokal Aceh, ada program), dan 4) Komunitas petani di desa Ulee Gunong (NAD), dataran tinggi, pendatang lokal, Aceh, tidak ada program).

Tabel 1. Lingkungan sosial di empat komunitas petani, 2007

Table 1. *The social circumstance on four ceasant communities, 2007*

Latar belakang ekologi dan migrasi <i>The ecology and migration background</i>	Fasilitasi pemerintah dalam pengembangan kebun kakao <i>Government facilitation on cocoa smallholder development</i>	
	Ada program <i>Have a programme</i>	Tidak ada program <i>Have not a programme</i>
Dataran rendah (<i>low land</i>)		
- Lokal (<i>non migrant</i>)	- Komunitas petani di desa tondo (Kaili) <i>Peasant community in Tondo village (Kaili)</i> (Bantuan/Parsial/P2WK, 1990) <i>Receive aid/Parcial/P2WK. 1990</i>	
	- Komunitas petani di desa Cot Baroh/ Tunong (Aceh) <i>Peasant community in Cot Baroh (Aceh)</i> (Bantuan/Parsial/ADB, 2006) <i>Receive aid/Parcial/ADB. 2006</i>	
- Pendatang luar (<i>outside migrant</i>)	- Komunitas petani di desa Jono Oge (Bugis) <i>Peasant community in Jono Oge (Bugis)</i> (Bantuan/Parsial/P2WK, 1990) <i>Receive aid/Parcial/ADB. 1990</i>	
Dataran tinggi (<i>high land</i>)		
- Pendatang lokal (<i>local migrant</i>)		- Komunitas Petani di Desa Ulee Gunong (Aceh) <i>Peasant community in Desa Ulee Gunong (Aceh)</i> (Swadaya murni) <i>Self supporting</i>

Metoda Pengumpulan dan Analisa Data

Data dan informasi penelitian dikumpulkan melalui kombinasi cara berikut : diskusi kelompok pada tingkat desa dan dusun, wawancara terhadap responden (30 responden per desa yang dipilih secara proporsional pada berbagai status petani berdasarkan penguasaan sumberdaya agraria), pengamatan lapangan, serta studi dokumen. Data dan informasi tersebut dianalisis melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terutama terhadap data dan informasi tentang proses perubahan struktur masyarakat agraris dan proses diferensiasi kesejahteraan petani, serta lingkungan kontekstual berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut. Sementara itu, analisis kuantitatif yang digunakan adalah metoda *Cross Tabs* (SPSS) untuk melihat seberapa banyak petani yang terlibat pada suatu kejadian dan Gini *ratio* untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi dalam pemilikan lahan dan kesejahteraan rumah tangga petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Struktur Sosial Komunitas Petani

Berbasis hubungan sosial dalam penguasaan lahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial komunitas petani kakao terdiferensiasi dalam banyak status. Fakta ini menunjukkan bahwa bentuk struktur masyarakat agraris yang muncul merupakan struktur yang terstratifikasi atau meliputi sub-kelas komunitas petani

menjadi banyak lapisan. Sebagian dari lapisan tersebut dibangun dengan status “tunggal” sedangkan sebagian lapisan lainnya dibangun dengan status “kombinasi”.

Secara lengkap, sosial komunitas petani adalah :

- 1) Petani Pemilik. Petani pada status ini menguasai lahan hanya melalui pola pemilikan tetap (baik petani pemilik yang lahannya diusahakan sendiri dan/atau petani pemilik yang lahannya diusahakan orang lain),
- 2) Petani Pemilik + Penggarap. Petani pada status ini menguasai lahan tidak hanya melalui pemilikan tetap tetapi juga pemilikan sementara (mengusahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa, gadai),
- 3) Petani Pemilik + Penggarap + Buruh Tani. Petani pada status ini selain menguasai lahan melalui pola pemilikan tetap dan pemilikan sementara (melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai) juga dengan cara menjadi buruh tani,
- 4) Petani Pemilik + Buruh Tani. Petani pada status ini menguasai lahan melalui pola pemilikan tetap. Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarga, mereka juga menjalankan peranan sebagai buruh tani,
- 5) Petani Penggarap. Petani pada status ini menguasai lahan hanya melalui pola pemilikan sementara (umumnya melalui sistem bagi hasil). Ditinjau dari sisi pemilikan, status petani penggarap termasuk tunakisma, tetapi kategori tunakisma petani penggarap menjadi

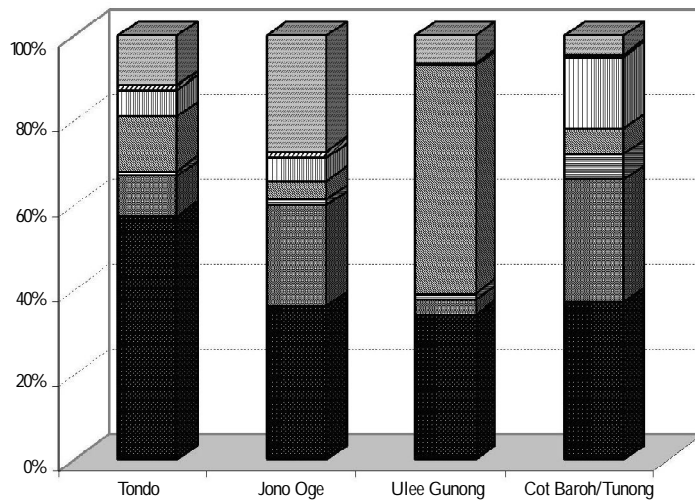
tidak mutlak karena ditinjau dari sisi penggarapan lahan mereka termasuk petani penguasa tanah (efektif).

6) Petani Penggarap + Buruh Tani. Petani pada status ini menguasai lahan melalui pola kepemilikan sementara (melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai). Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarga, mereka juga menjalankan peranan sebagai buruh tani. Sebagaimana status petani penggarap, status ini termasuk tunakisma tetapi tidak mutlak.

7) Buruh Tani. Petani pada status ini benar-

benar tidak menguasai lahan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tunakisma mutlak. Walaupun demikian, mereka masih memperoleh manfaat dari lahan dengan cara menjadi buruh tani. Pada umumnya buruh tani di desa lokasi penelitian juga menjadi buruh kegiatan non usahatani dan/atau mencari hasil hutan terutama pada saat pekerjaan berburuh pertanian sedang tidak ada.

Ternyata ketujuh status tersebut muncul



Sumber data (Source) : Sensus rumahtangga melalui diskusi dengan informan kunci (Family census by discussion with key peasant).

- 1. Buruh Tani (BT) (Laborer)
- 2. Penggarap+ BT (Worker+ Laborer)
- 3. Penggarap (Worker)
- 4. Pemilik +Buruh Tani (Owner+ Laborer)
- 5. Pemilik+ Penggarap+ Buruh Tani (Owner+ Worker+ Laborer)
- 6. Pemilik+ Penggarap (Owner+ Worker)
- 7. Pemilik (Owner)

Gambar 1. Struktur sosial di empat komunitas petani, 2007.

Figure 1. Social structure on four peasant communities, 2007.

Tabel 2. Distribusi petani berdasarkan status penguasaan lahan, 2007

Table 2. The farmer distribution base on the status of land owner

Status dalam penguasaan lahan <i>The status of land owner</i>	Tondo		Jono Oge		Ulee Gunong		Cot Baroh	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
1. Pemilik (<i>Owner</i>)	157	57.5	68	36.4	85	34.1	68	37.2
2. Pemilik + penggarap (<i>Owner + Worker</i>)	26	9.5	44	23.5	9	3.6	53	29.0
3. Pemilik + penggarap + BT <i>Owner + Worker + Laborer</i>	3	1.1	3	1.6	4	1.6	11	6.0
4. Pemilik + BT (<i>Owner + Laborer</i>)	35	12.8	8	4.3	134	53.8	11	6.0
5. Penggarap (<i>Worker</i>)	17	6.2	10	5.3	-	-	31	16.9
6. Penggarap + BT (<i>Worker + Laborer</i>)	3	1.1	3	1.6	1	0.4	1	0.5
7. BT (Buruh Tani) (<i>Laborer</i>)	32	11.7	51	27.3	16	6.4	8	4.4
Jumlah (<i>Total</i>)	273	100.0	187	100.0	249	100.0	183	100.0
A. Jumlah Pemilik (<i>Total of owner</i>)	221	80,92	123	65,8	223	93,2	143	78,2
B. Jumlah Tunakisma (<i>Total of landless</i>)	52	19,08	64	34,2	26	6,8	40	21,8
- Tunakisma Tidak Mutlak (Penggarap) <i>Not absolute landless</i>	20	7,3	13	6,9	1	0,4	32	17,4
- Tunakisma Mutlak (Buruh Tani) <i>Absolute landless</i>	32	11.7	51	27.3	16	6.4	8	4.4

Sumber data (*Source*) : Sensus rumahtangga melalui diskusi dengan informan kunci (*Family census by discussion with key farmers*).

di semua komunitas lokasi penelitian, kecuali status petani penggarap tunggal tidak muncul pada komunitas petani di desa Ulee Gunong (Gambar 1). Hal ini terjadi karena lahan di Desa Ulee Gunong hanya diusahakan untuk tanaman perkebunan (kakao dan/atau kopi). Selain itu, banyak kebun kakao dan/atau kopi yang kondisinya kurang baik dan produktivitas tanamannya sangat rendah sehingga tidak layak untuk dibagihasikan.

Hasil sensus di empat komunitas petani kakao di luar Jawa menunjukkan bahwa proporsi lapisan petani dengan status "petani pemilik" (tunggal + kombinasi) masih merupakan bagian terbesar tetapi umumnya sudah tidak dominan lagi, kecuali di Desa

Tondo. Bahkan, lapisan petani tunakisma (petani penggarap, buruh tani, dan penggarap + buruh tani) sudah muncul di semua komunitas petani, walaupun proporsi mereka umumnya masih relatif sedikit (Tabel 2).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa petani pemilik yang luas lahannya kurang dari 2 hektar umumnya masih cukup banyak. Realitas ini terjadi pada pemilikan lahan total (seluruh lahan termasuk yang tidak berproduksi). Bahkan pada pemilikan lahan produktif (hanya lahan yang berproduksi) realitas tersebut lebih menonjol. Data pada Tabel 3. menunjukkan bahwa proporsi petani pemilik yang luas lahan totalnya kurang dari 2 hektar masih cukup

Tabel 3. Distribusi petani berdasarkan luas pemilikan lahan total, 2007

Table 3. *The farmer distribution base on the size of land ownership (Total land)*

Luas pemilikan <i>Ownership size</i>	Jono Oge		Tondo		Cot Baroh/ Tunong		Ulee Gunong	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
0	50	26.7	34	12.4	10	5.5	16	5.9
> 0 - < 0.5	3	1.6	15	5.5	10	5.5	2	0.7
0.5 - < 1	22	11.8	70	25.5	11	6.0	51	18.8
1 - < 2	44	23.5	76	27.7	59	32.2	148	54.4
2 - < 3	27	14.4	43	15.7	70	38.3	38	14.0
3 - < 4	15	8.0	20	7.3	13	7.1	12	4.4
> / 4	26	13.9	16	5.8	10	5.5	5	1.8
Total (Total)	187	100.0	274	100.0	183	100.0	272	100.0
0 - < 1	75	40.1	119	43.4	31	16.9	69	25.4
> 0 - < 2	69	36.9	161	58.8	80	43.7	201	73.9
Rata-rata (<i>Average</i>)		1.288		2.168		1.697		1.373
Tertinggi (<i>Largest</i>), ha		74		16		8.8		13.5

Sumber data (*Source*): Sensus rumah tangga melalui diskusi dengan informan kunci (*Family census by discussion with key farmers*).

besar, bahkan di desa Tondo dan di Desa Ulee Gunong merupakan bagian terbesar (masing-masing 58,8% dan 73,9%). Kemudian data Tabel 4. menunjukkan bahwa proporsi petani pemilik yang luas lahan "produktifnya" kurang dari 2 hektar lebih besar daripada proporsi petani pemilik yang luas lahan "totalnya" kurang dari 2 hektar.

Data pada Tabel 3 dan Tabel 4 juga menunjukkan bahwa di desa-desa lokasi penelitian belum terjadi "pemusatan lahan" yang sangat nyata. Meskipun di semua desa lokasi penelitian terdapat sejumlah petani yang oleh masyarakat sudah dikategorikan sebagai petani luas yang kaya tetapi luas lahan yang dimiliki umumnya hanya sekitar 10 ha. Petani "pemilik sangat luas" hanya muncul di Desa Jono Oge yang beretnis Bugis dan merupakan keturunan perintis pertama.

Adapun luas lahan yang dimilikinya mencapai 74 ha, tetapi lahan tersebut tersebar pada 21 plot dan sebagian besar lahan (49,5 ha) berada di luar desa. Walaupun luas lahan milik petani tersebut sangat luas, tetapi seluruh lahan padi sawah dan kebun kakao diusahakan dengan pola bagi hasil. Hanya kebun kelapa dan cengkeh yang diusahakan sendiri oleh petani dengan menggunakan buruh upahan, dan untuk mengawasi buruh upahan yang bekerja kadang-kadang petani pemilik luas kaya tersebut menggunakan mandor tidak tetap.

Meskipun realitas struktur komunitas petani saat ini masih cenderung berada dalam bentuk yang terstratifikasi, tetapi dengan menggunakan alat analisa (statistik) gini *ratio* dapat ditunjukkan bahwa ketimpangan dalam pemilikan lahan di dalam

Tabel 4. Distribusi petani berdasarkan luas pemilikan lahan produktif, 2007

Table 4. The farmer distribution base on the size of land ownership, 2007

Luas pemilikan, ha <i>Ownership size, ha</i>	Jono Oge		Tondo		Cot Baroh/ Tunong		Ulee Gunong	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
0	64	34.2	51	18.6	41	22.4	41	15.1
< 0.5	5	2.7	17	6.2	22	12.0	7	2.6
0.5 - < 1	23	12.3	67	24.5	33	18.0	119	43.8
1 - < 2	36	19.3	82	29.9	71	38.8	91	33.5
2 - < 3	28	15.0	30	10.9	10	5.5	10	3.7
3 - < 4	14	7.5	14	5.1	5	2.7	2	0.7
> 4	17	9.1	13	4.7	1	0.5	2	0.7
Total (<i>Total</i>)	187	100.0	274	100.0	183	100.0	272	100.0
0- < 1	92	49.2	135	49.3	96	52.5	167	61.4
> 0 - < 2	64	34.2	166	60.6	126	68.9	217	79.8
Rata-rata (<i>Average</i>)		1,069		1,813		1,697		1,373
Tertinggi (<i>Largest</i>), ha		71		12		4		10

Sumber data (*Source*): Sensus rumah tangga melalui diskusi dengan informan kunci (*Family census by discussion with key farmers*).

Tabel 5. Hasil analisa *gini ratio* terhadap luas pemilikan lahan, 2007Table 5. The result of *gini ratio* analysis on land ownership size

Desa <i>Village</i>	Lahan total <i>Total land</i>	Lahan produktif <i>Productive land</i>
Tondo	0,44 M	0,59 T
Jono Oge	0,69 T	0,71 T
Cot Baroh	0,57 T	0,42 M
Ulee Gunong	0,32 R	0,55 T

Sumber data (*Source*): Diolah dari data sensus rumah tangga melalui diskusi dengan informan kunci (*Calculated from family census by discussion with key farmers*).

Keterangan (*Notes*):

Nilai *Gini ratio* < 0,4 = R = Ketimpangan rendah (*Low imbalance*);

0,4 – 0,5 = M = Ketimpangan moderat (*Moderate imbalance*);

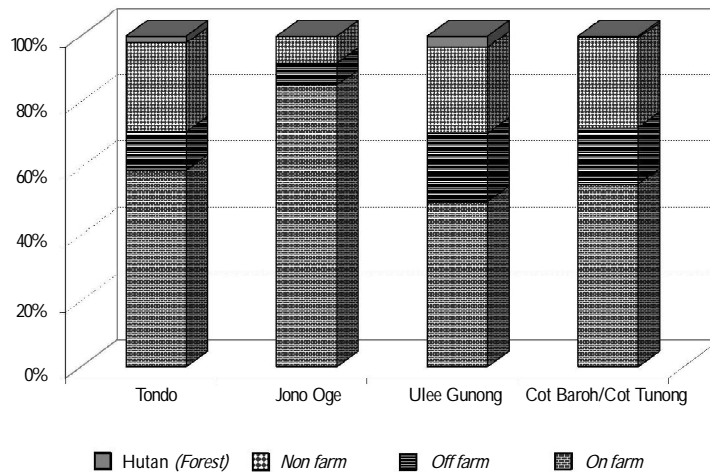
> 0,5 = T = Ketimpangan tinggi (*Hight imbalance*).

komunitas petani lokasi penelitian sudah mulai tampak (Tabel 5). Realitas ketimpangan pemilikan lahan tersebut umumnya semakin besar bila analisis gini *ratio* dilakukan pada pemilikan lahan produktif, yaitu lahan yang sudah menghasilkan (berproduksi). Tingginya angka ketimpangan penguasaan lahan berlangsung sejalan dengan adanya proses penguasaan lahan yang memberi jalan pada struktur sosial masyarakat agraris yang terpolarisasi.

Dalam hal pemilikan lahan total, ketimpangan yang termasuk kategori tinggi terjadi pada komunitas petani di Desa Jono Oge dan pada komunitas di Desa Cot Baroh. Bahkan, ketimpangan paling tinggi terjadi pada komunitas petani di Desa Jono Oge yang berlatar belakang etnis pendatang Bugis. Pada komunitas petani di Desa Tondo, ketimpangan pemilikan lahan total masih termasuk kategori moderat dan pada komunitas petani di Desa Ulee Gunong,

ketimpangan pemilikan lahan total masih termasuk kategori rendah.

Lebih lanjut bila analisa gini *ratio* dilakukan hanya terhadap lahan produktif, ternyata ketimpangan pemilikan lahan pada komunitas petani di Desa Jono Oge, di Desa Tondo, dan di Desa Ulee Gunong lebih tinggi dibanding ketimpangan pada pemilikan lahan total, dan kategori ketimpangan penguasaan lahan di ketiga desa dimaksud berada dalam kategori ketimpangan tinggi. Realitas tersebut terjadi karena banyak petani pemilik kebun yang tanamannya sudah rusak sehingga kebun tersebut tidak lagi berproduksi. Sementara itu, pada komunitas petani di Desa Cot Baroh/Cot Tunong, ketimpangan pemilikan lahan produktif lebih rendah dibanding ketimpangan pemilikan lahan total. Realitas tersebut muncul karena di desa Cot Baroh/Cot Tunong luas lahan kebun kakao yang



Gambar 2. Struktur penghasilan petani di empat komunitas petani, 2007.

Figure 2. Structure of farmer income on four peasant communities, 2007.

baru dibangun (belum produktif) cukup besar tetapi distribusinya relatif kurang merata sehingga berperan kuat dalam meningkatkan ketimpangan pemilikan lahan dalam komunitas petani tersebut.

Dominasi Peranan Lahan Dalam Struktur Penghasilan Rumah tangga Petani

Pada saat penelitian berlangsung, penghasilan dari lahan milik komunal sudah menghilang. Walaupun demikian, sumber penghasilan anggota komunitas petani di

desa-desa lokasi penelitian masih mengandalkan lahan tetapi lahan tersebut sudah dimiliki secara individual. Struktur penghasilan petani di desa-desa lokasi penelitian umumnya masih didominasi oleh penghasilan lahan dari *on-farm* dalam bentuk hasil usaha tani (padi sawah, perkebunan, dan ternak). Bahkan, di Desa Jono Oge proporsi penghasilan dari lahan *on farm* mencapai 85% (Gambar 2). Penghasilan lahan dari *off farm* dalam bentuk hasil agro-industri, perdagangan hasil pertanian, dan buruh tani serta penghasilan dari sumber *non farm* umumnya masih relatif kecil. Penghasilan

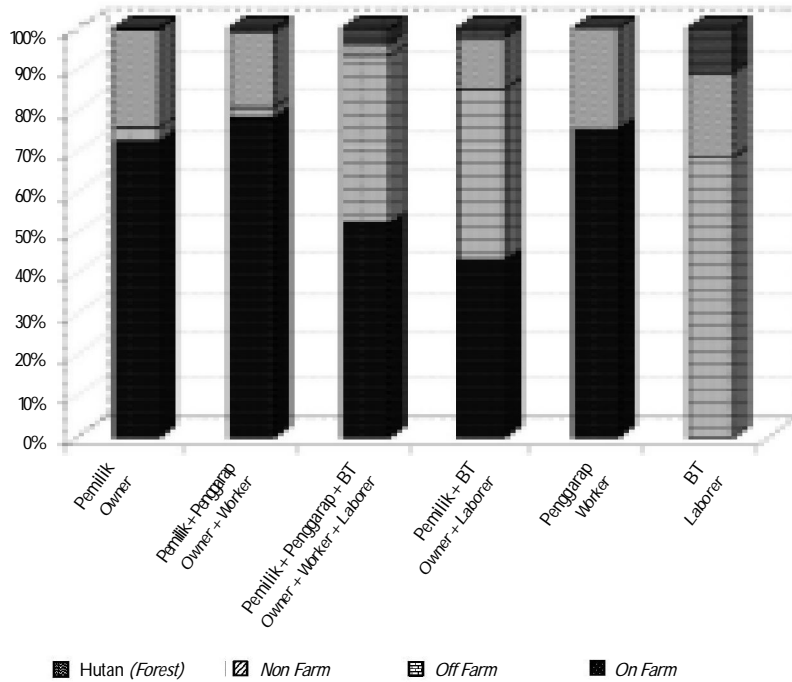
Tabel 6. Struktur penghasilan petani di empat komunitas petani, 2007

Table 6. The structure of farmer income on four peasant communities, 2007

Jenis penerimaan Type of income	Tondo	Jono Oge	Ulee Gunong	Cot Baroh/ Cot Tunong
<i>On farm</i>				
• Kakao (<i>Cocoa</i>)	62,995,000	74,213,000	221,485,000	139,950,000
• Kopi (<i>Coffee</i>)			81,527,500	3,500,000
• Pinang (<i>Beattle nut</i>)			10,575,000	8,832,000
• Cengkeh (<i>Clove</i>)	67,658,000	197,115,000		
• Kelapa (<i>Coconut</i>)	58,392,500	282,389,800		
• Buah (<i>Fruit</i>)	480,000	50,000,000	2,400,000	4,100,000
• Padi (<i>Rice</i>)	50,435,500	189,235,000		123,978,742
• Sayuran (<i>Vegetable</i>)		2,750,000	8,137,500	6,620,000
• Ternak (<i>Cattle</i>)	8,825,000	32,700,000	4,725,000	51,510,000
• Ustan Lain (<i>Others</i>)		2,000,000		200,000
<i>Off farm</i>				
• Agroindustri (<i>Agro industry</i>)	5,200,000	36,180,000	27,000,000	750,000
• Buruh Tani (<i>Laborer</i>)	43,316,000	30,435,000	108,960,000	103,230,000
<i>Non farm</i>				
• Pegawai/Tukang (<i>Employee</i>)	42,000,000	43,620,000	111,800,000	67,600,000
• Kiriman Anak (<i>Aids from children</i>)	12,800,000		1,200,000	1,250,000
• Lainnya (<i>Others</i>)	57,800,000	35,500,000	58,950,000	98,320,000
Hutan (<i>Forest</i>)	9,624,000		21,660,000	3,840,000

Sumber data (*Source*): Rumah tangga petani responden (*Household response*).

Bentuk struktur sosial komunitas petani dan implikasinya terhadap diferensiasi kesejahteraan. Studi kasus pada komunitas petani kakao di Sulawesi tengah dan nangroe Aceh darussalam



Gambar 3. Struktur penghasilan petani berdasarkan status sosial, 2007.

Figure 3. Structure of farmer income base on farmer social status, 2007.

Sumber Data (Source): Rumah tangga petani responden (Household response).

non farm umumnya berasal dari gaji pegawai, tukang, pedagang non hasil tani (warung/keliling).

Mengacu pada data dari responden (Tabel 6), meskipun luas lahan yang digunakan untuk usaha tani kakao paling dominan, ternyata di desa-desa penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah peranan penghasilan *on farm* dari usaha tani kakao tidak dominan. Hal ini terjadi akibat serangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK) yang telah menurunkan produksi kakao sekitar 60%. Sebaliknya, di desa-desa lokasi penelitian di Provinsi NAD peranan penghasilan *on farm* dari usaha tani kakao masih

cukup dominan karena serangan PBK di wilayah ini masih relatif lebih rendah. Kemudian di Desa Jono Oge, meskipun luas kebun kelapa di desa tersebut relatif kecil tetapi penghasilan dari *on farm* kebun kelapa cukup besar. Hal ini terjadi karena di desa tersebut banyak petani yang menguasai kebun kelapa melalui sistem sewa *bapajak*. Bahkan, banyak penyewaan kebun kelapa yang tidak hanya dilakukan di dalam wilayah desa tetapi juga berlangsung sampai ke wilayah desa lain.

Sebagian besar penghasilan *off farm* di desa-desa lokasi penelitian masih relatif kecil dan umumnya tidak bersal dari agroindustri

tetapi masih bertumpu pada penghasilan sebagai upah buruh tani (Tabel 6). Agro-industri yang ada di desa-desa lokasi penelitian masih terbatas pada usaha penyewaan traktor dan alat pascapanen padi (penggilingan padi). Sampai saat ini, produk usahatani perkebunan yang dihasilkan para petani masih dijual dalam bentuk bahan mentah hasil panen dari kebun. Pengolahan hasil yang dilakukan para petani masih sangat sederhana dan umumnya hanya penjemuran. Sementara itu, peluang sumber penghasilan *non-farm* yang tersedia bagi keluarga petani, baik yang ada di dalam desa maupun di luar desa (termasuk kiriman anak) jumlahnya masih sedikit. Pada umumnya sumber penghasilan *non-farm* yang ada di desa-desa lokasi penelitian adalah upah tukang, hasil perdagangan kecil-kecilan (dalam bentuk warung atau pedagang keliling yang menjual kebutuhan pokok), dan gaji pegawai (terutama pegawai guru dan pegawai di lingkungan kantor kecamatan).

Pekerjaan sebagai buruh tani di desa-desa lokasi penelitian lebih dikenal dengan istilah "mencari upahan" atau "makan gaji". Peluang pekerjaan berburuh tani di desa-desa penelitian terutama terdapat pada berbagai kegiatan usahatani padi sawah, baik pada kegiatan penanaman, pemeliharaan maupun pemanenan. Sementara itu, peluang pekerjaan berburuh pada usahatani perkebunan relatif lebih sedikit, karena kegiatan penanaman berlangsung sekali dalam kurun waktu sekitar 30 tahun. Dalam tahap pengelolaan usahatani perkebunan, peluang berburuh hanya berlangsung pada kegiatan pemeliharaan (seluruh tanaman perkebunan) dan pada kegiatan pemanenan (terutama pada tanaman kelapa dan cengkeh). Pekerjaan

sebagai buruh tani seringkali dilakukan para petani bukan hanya di lingkungan desa sendiri tetapi sampai ke lingkungan luar desa. Hal ini terutama banyak dilakukan para petani di Desa Ulee Gunong NAD dimana di desa tersebut tidak ada usaha tani padi sawah.

Umumnya masyarakat desa "mencari upahan" pada berbagai lapangan kerja, baik di sektor pertanian (di desa), non pertanian (di desa dan di kota), atau kehutanan (di desa). Oleh sebab itu, pekerjaan berburuh sering disebut masyarakat sebagai pekerjaan "mocok-mocok". Mencari hasil hutan dianggap berburuh karena mereka seringkali dibiayai penampung dan kemudian diperhitungkan setelah memperoleh hasil hutan. Di desa-desa penelitian di provinsi NAD, mencari upahan berkembang pesat setelah banyak kucuran dana bantuan Tsunami. Oleh sebab itu, mencari upahan (berburuh) menjadi pilihan pekerjaan baru bagi para petani karena nilai upahnya meningkat tajam, yaitu menjadi Rp50.000/hari (kerja mulai jam 08.00–16.00), Padahal sebelumnya nilai upah buruh hanya Rp30.000/hari.

Bila struktur penghasilan petani dikaitkan dengan status sosial petani (berdasarkan penguasaan lahan), tampak bahwa peranan lahan dalam bentuk pengelolaan usaha tani (*on farm*) sangat menonjol pada status petani pemilik (72%), petani "pemilik + penggarap" (78%), dan petani penggarap (75%). Namun demikian, peranan lahan dimaksud relatif rendah pada status petani "pemilik + penggarap + buruh tani" dan status petani "pemilik + buruh tani, yaitu masing-masing sebesar 52% dan

43% (Gambar 3). Pada struktur penghasilan kedua status tersebut peranan sumber penghasilan dari *off-farm* (terutama dari upah buruh tani cukup besar, yaitu masing-masing mencapai 41% dan 42%). Dalam hal ini penghasilan dari *off-farm* telah berperan menggantikan kekurangan penghasilan petani dari lahan *on-farm*.

Diferensiasi Kesejahteraan Dalam Komunitas Petani

Komunitas petani di semua desa lokasi penelitian memahami adanya perbedaan tingkat kesejahteraan di antara anggota komunitas. Hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh anggota komunitas petani di semua lokasi penelitian menunjukkan bahwa komunitas petani terbagi menjadi 3 (tiga) lapisan, yaitu 1) Lapisan Miskin, 2) Lapisan Sedang, dan 3) Lapisan Kaya. Dalam memposisikan seorang anggota komunitas pada suatu lapisan kesejahteraan tertentu, anggota komunitas menggunakan indikator-indikator berikut : a) rata-rata penghasilan/hari, b) penghasilan dari hasil lahan, c) kondisi rumah, d) kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari, e) kepemilikan alat transportasi, f) dan tingkat pendidikan anak.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka masing-masing lapisan dapat dibedakan sebagai berikut :

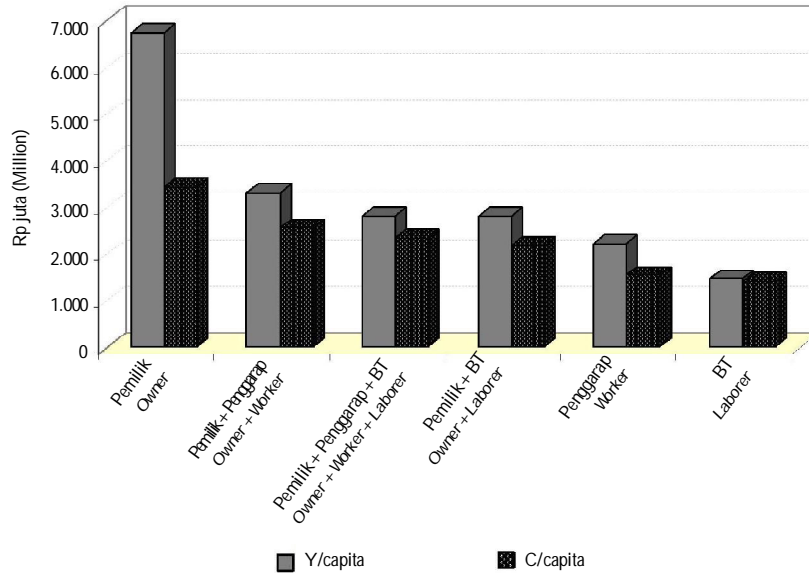
- 1) Lapisan Miskin. Lapisan ini merupakan anggota komunitas yang mempunyai ciri utama berikut : a) rata-rata penghasilan/hari sekitar Rp15.000,-, b) penghasilan utama berasal dari lahan produktif milik sendiri (kebun dan/atau sawah) tetapi luasnya sangat terbatas (kurang dari 1 ha), hasil dari sistem bagi hasil kebun/sawah milik petani lain, dan/atau hasil bekerja sebagai buruh tani, c) kondisi rumah gubuk berdinding kayu, d) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat sering berutang, e) tidak memiliki alat transportasi sendiri, f) pendidikan anak maksimal hanya sampai tingkat SD.
- 2) Lapisan Sederhana (Sedang/Cukup). Lapisan ini merupakan anggota komunitas yang mempunyai ciri utama berikut : a) rata-rata penghasilan/hari sekitar Rp30.000,-, b) penghasilan utama dari

Tabel 7. Rerata penerimaan dan pengeluaran petani, 2007

Table 7. The average of farmer income and expenditure, 2007

Status sosial petani <i>Farmers social status</i>	Pengeluaran/Kapita/Tahun, Rp.Juta <i>Expenditure/Capita/Year, million</i>	Penerimaan/Kapita/Tahun, Rp.Juta <i>Income/Capita/Year, million</i>
Pemilik (<i>Owner</i>)	6.747	3.431
Pemilik + Penggarap (<i>Owner + worker</i>)	3.324	2.559
Pemilik + Penggarap + BT (<i>Owner + worker + laborer</i>)	2.807	2.345
Pemilik + BT (<i>Owner + laborer</i>)	2.816	2.182
Penggarap (<i>Worker</i>)	2.230	1.544
BT (<i>Laborer</i>)	1.467	1.424

Sumber data (*Source*): Rumah tangga petani responden (*Response of farmer family*).



Gambar 4. Rerata penerimaan dan pengeluaran petani, 2007.

Figure 4. The average of farmer income and expenditure (Base on farmer social status).

Sumber Data (Source) : Rumah tangga petani responden (Response of farmer family)

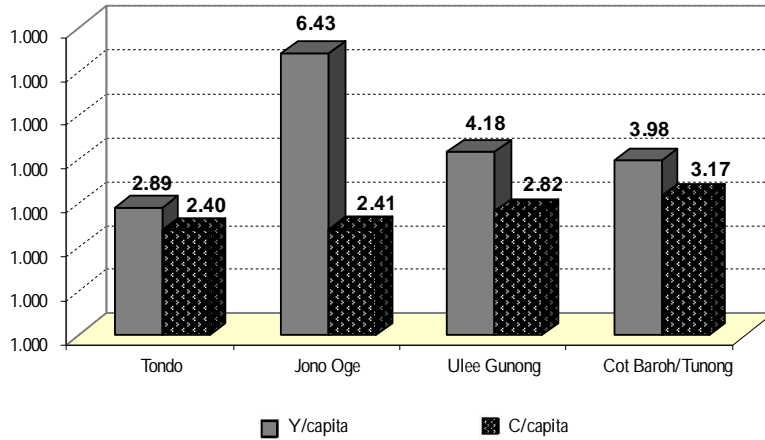
Keterangan (Notes) : Y = penerimaan (Income), C = pengeluaran (expenditure)

lahan produktif milik sendiri dengan luas > /1–2 ha, perdagangan (warung), dan/ atau pegawai (umumnya PNS), c) kondisi rumah semi permanen (sebagian ber-dinding tembok), d) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kadang-kadang berutang, e) sebagian besar memiliki alat transportasi motor, e) pendidikan anak minimal SMP.

- 3) Lapisan Kaya (Mampu). Lapisan ini merupakan anggota komunitas yang mempunyai ciri utama berikut : a) rata-rata penghasilan/hari minimal Rp50.000,- b) penghasilan utama dari lahan produktif milik sendiri dengan luas sekitar 5 ha, perdagangan besar, dan/atau pegawai, c) kondisi rumah permanen (berdinding

dan berlantai tembok), d) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak perlu berutang, e) mempunyai alat transportasi mobil, f) sekolah anak sudah sampai perguruan tinggi (minimal SMA), g) sudah menunaikan ibadah haji.

Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari rumah tangga petani responden dan berdasarkan status sosial petani (status penguasaan lahan), penerimaan dan pengeluaran per kapita rumah tangga petani menurun dari satu status ke status lainnya. Penurunan penerimaan dan pengeluaran pada status ini berkaitan dengan semakin kecilnya akses petani dalam penguasaan lahan (Tabel 7 dan Gambar 4). Dalam hal ini, tuna kisma



Gambar 5. Rerata penerimaan dan pengeluaran petani, 2007.

Figure 5. The average of farmer household Income and expenditure (Base on Farmer Social Status).

Sumber Data (Source) : Rumah tangga petani responden (Response of farmer family)

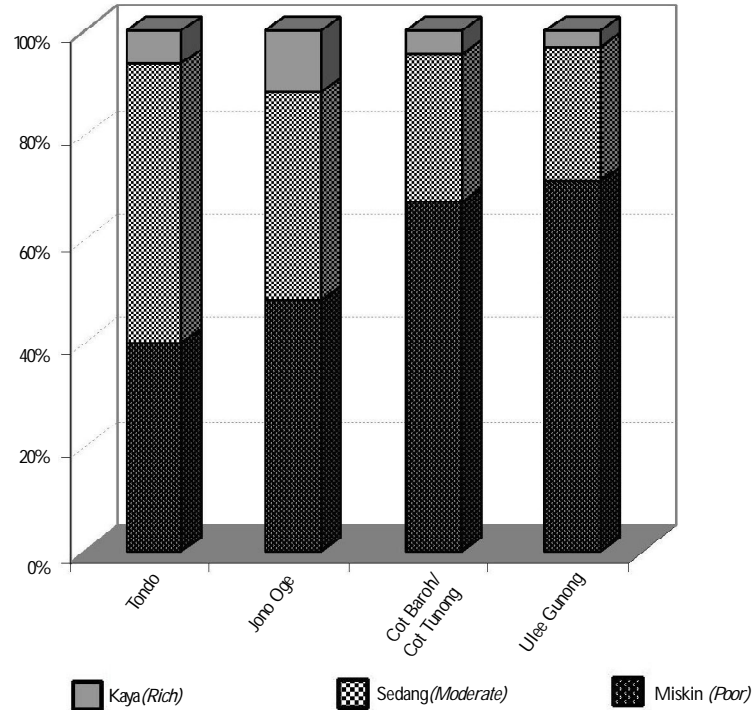
Keterangan (Notes) : Y = penerimaan (income), C = pengeluaran (expenditure)

penggarap dan buruh tani secara berturut-turut merupakan dua status dengan tingkat penerimaan dan pengeluaran paling rendah. Kemudian, mengacu pada hasil uji beda nyata (LSD dengan tingkat kepercayaan 20%) menunjukkan bahwa perbedaan penerimaan per kapita yang signifikan terjadi antara status Pemilik dengan status Pemilik + Buruh Tani dan antara status Pemilik dengan status Buruh Tani. Sementara itu, perbedaan pengeluaran per kapita yang signifikan terjadi antara status Pemilik dengan status Pemilik + Penggarap, Pemilik + Penggarap + BT, Pemilik + BT, Penggarap", dan Buruh Tani serta antara status Buruh Tani dengan status Pemilik + Penggarap, Pemilik + Penggarap + Buruh Tani, dan Pemilik + Buruh Tani.

Bila penerimaan petani (kapita/tahun) antarkomunitas petani dibandingkan nampak bahwa para petani di Desa Jono Oge mem-

punyai tingkat penerimaan paling tinggi. Walaupun berada di provinsi dan keadaan ekologis yang sama, keadaan tersebut sangat kontras dengan penerimaan rumah tangga petani di Desa Tondo. Bahkan penerimaan rumah tangga di desa Tondo berada pada tingkat paling rendah di antara empat desa lokasi penelitian. Sementara itu, tingkat penerimaan rumah tangga petani di kedua komunitas petani di provinsi NAD relatif sama, meskipun keadaan ekologisnya berbeda. Sejalan dengan itu, hasil uji beda nyata (LSD, dengan tingkat kepercayaan 80%) menunjukkan bahwa penerimaan rumah tangga petani yang berbeda hanya terjadi antara rumah tangga petani di Desa Jono Oge dengan rumah tangga petani di Desa Tondo.

Secara kualitatif, munculnya realitas= perbedaan penghasilan antara rumah tangga petani di desa Jono Oge dan Tondo sejalan



Gambar 6. Distribusi petani berdasarkan tingkat kesejahteraan, 2007.

Figure 6. The farmer distribution base on welfare level 2007.

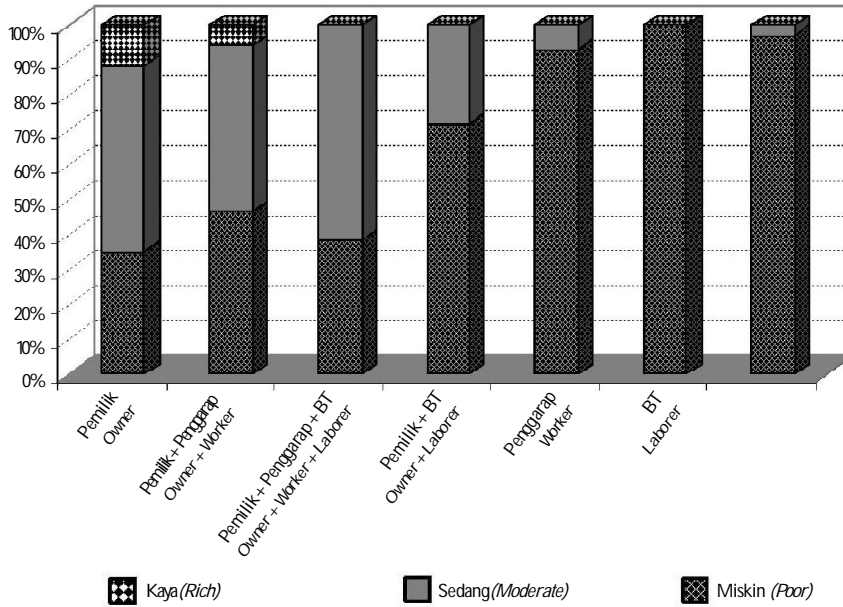
Sumber Data (Source) : Rumahtangga petani responden (Response of farmer family).

dengan ungkapan yang sering dikemukakan oleh masyarakat Tondo maupun masyarakat Jono Oge bahwa orang Bugis lebih rajin dalam bekerja/berusaha daripada orang Kaili. Fenomena lebih rajinnya orang Bugis juga ditunjukkan oleh prestasi penggarapan sawah. Dalam hal ini, seluruh sumberdaya lahan sawah di Desa Jono Oge diusahakan para petani. Sebaliknya, di Desa Tondo banyak sumberdaya lahan sawah yang tidak diusahakan.

Sementara itu, dalam hal pengeluaran (pengeluaran/kapita/tahun), rumahtangga petani di desa-desa lokasi penelitian di

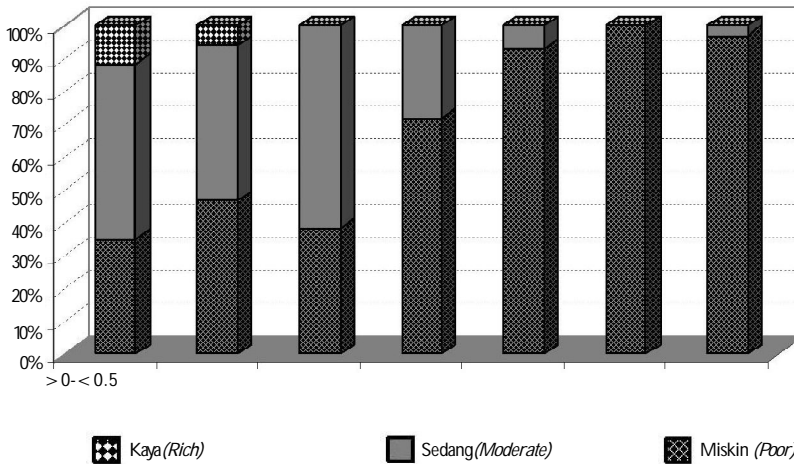
Provinsi NAD mempunyai pengeluaran yang lebih tinggi dibanding rumah tangga petani di desa-desa lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan uji beda nyata LSD, dengan tingkat kepercayaan 80%) menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga petani yang berbeda terjadi antara rumahtangga petani di Desa Cot Baroh/Cot Tunong dengan rumah tangga petani di Desa Tondo dan Desa Jono Oge. Fenomena tersebut sejalan dengan data garis kemiskinan BPS, bahwa angka garis kemiskinan di Kabupaten Pidie-provinsi NAD sekitar 15% lebih tinggi dibanding

Bentuk struktur sosial komunitas petani dan implikasinya terhadap diferensiasi kesejahteraan. Studi kasus pada komunitas petani kakao di Sulawesi Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam



Gambar 7. Distribusi petani berdasarkan status sosial dan tingkat kesejahteraan, 2007.
 Figure 7. The farmer distribution base on farmer social status and welfare level, 2007.

Sumber Data (Source) : Rumahtangga petani responden (Response of farmer family).



Gambar 8. Distribusi petani berdasarkan tingkat kesejahteraan dan luas kepemilikan lahan produktif, 2007.
 Figure 8. The farmer distribution base on welfare level and the size of ownership of productive Land.

Sumber Data (Source) : Sensus rumahtangga petani melalui informan kunci (Calculated from family census by discussion with key farmers)

Tabel 8. Hasil Analisa Gini Ratio Terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Petani, 2007

Table 8. The Result of Gini Ratio Analysis on Farmer Income and Expenditure

Desa <i>Village Name</i>	Penerimaan Total <i>Total Income</i>	Pengeluaran Total <i>Total Expenditure</i>	Penerimaan/Kapita <i>Income/Capita</i>	Pengeluaran/Kapita <i>Expenditure/Capita</i>
Jono Oge	0,70 T	0,37 R	0,69 T	0,30 R
Tondo	0,38 R	0,31 R	0,37 R	0,28 R
Cot Tunong/Baroh	0,29 R	0,25 R	0,30 R	0,22 R
Ulee Gunong	0,39 R	0,25 R	0,41 M	0,25 R

Keterangan (Notes): < 0,4 = Rendah (*Low*), R; 0,4 - 0,5 = Moderate (*Moderate*), M; > 0,5 = Tinggi (*High*), H.

angka garis kemiskinan di Kabupaten Donggala–provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan tingkat kesejahteraan yang direkonstruksikan anggota komunitas (Gambar 6), hampir di semua komunitas petani proporsi rumah tangga petani lapisan miskin masih menjadi bagian terbesar, kecuali di desa Tondo dimana rumahtangga lapisan miskin dan lapisan sedang relatif sama. Bahkan di desa-desa lokasi penelitian di Provinsi NAD rumahtangga petani lapisan miskin sangat tinggi (di atas 70%). Di desa-desa penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah rumahtangga petani lapisan sedang mendekati 50%. Sementara itu, proporsi rumahtangga petani lapisan kaya umumnya masih dibawah 10%, kecuali di Desa Jono Oge–Provinsi Sulawesi Tengah dimana lapisan tersebut telah mencapai 12%.

Berdasarkan pola penguasaan lahan, sebagian besar petani pemilik ternyata masih berada pada tingkat kesejahteraan sedang, bahkan sebagian kecil lainnya berada pada tingkat kesejahteraan miskin (Gambar 7). Hal ini terjadi karena luas lahan produktif

yang dimiliki relatif sempit (kurang dari satu hektar). Sementara itu, sebagian besar status buruh tani, status petani pemilik + buruh tani, dan status petani penggarap berada pada tingkat kesejahteraan miskin (proporsi masing-masing 100%, 63%, dan 50%), sedangkan petani lain dalam kategori dimaksud hanya berada pada tingkat kesejahteraan sedang. Adanya petani kaya pada status petani pemilik + penggarap terjadi karena terdapat penggarap (terutama penyewa kebun kelapa) yang merupakan petani kaya.

Bila tingkat kesejahteraan petani tersebut dikaitkan dengan luas pemilikan lahan, tampak bahwa petani dengan tingkat kesejahteraan kaya umumnya adalah petani yang memiliki lahan produktif lebih dari 4 hektar (Gambar 9). Adanya sejumlah petani yang pemilikan lahannya kurang dari 4 hektar tetapi berada dalam lapisan kesejahteraan kaya terjadi karena selain mereka memperoleh penghasilan dari lahan juga memperoleh penghasilan dari sumber non pertanian, misalnya dari usaha dagang dan gaji pegawai.

Dengan menggunakan analisa *Gini ratio* (Tabel 8) terhadap data rumahtangga petani responden diperoleh gambaran bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran yang terjadi di empat komunitas petani lokasi penelitian masih dalam kategori rendah, baik dalam hal pengeluaran total maupun dalam hal pengeluaran/kapita/tahun. Sementara itu, dengan menggunakan alat analisis yang sama, ternyata dalam hal penerimaan rumahtangga petani (pendapatan total maupun pendapatan/kapita/tahun) ketimpangan yang terjadi dalam komunitas petani di Desa Jono Oge-sebuah desa pendatang etnis Bugis-sudah tergolong tinggi. Tingginya tingkat ketimpangan penerimaan dalam komunitas petani di Desa Jono Oge diduga berkaitan dengan adanya petani kaya yang kondisinya jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan petani kaya yang muncul di desa-desa lokasi penelitian lain.

Bila data ketimpangan penerimaan dan pengeluaran rumah tangga petani dibandingkan dengan ketimpangan pemilikan (tetap) lahan produktif, tampak bahwa umumnya ketimpangan yang terjadi dalam pemilikan (tetap) lahan produktif relatif lebih tinggi dibanding ketimpangan yang terjadi dalam penerimaan dan pengeluaran rumahtangga petani. Hal ini terjadi karena upaya petani dalam memperoleh penghasilan umumnya tidak terbatas hanya dari lahan yang dimiliki melalui mekanisme pemilikan tetap. Ternyata para petani memperoleh jalan lain melalui mekanisme pemilikan sementara (terutama melalui mekanisme bagi hasil dan sewa). Selain itu, para petani juga dapat memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan *off farm* (terutama berburuh tani) dan dari sumber penghasilan *non farm*. Kenyataan

munculnya realitas ketimpangan distribusi penerimaan dan pengeluaran warga komunitas yang lebih rendah dari ketimpangan distribusi pemilikan warga komunitas menunjukkan bahwa distribusi penguasaan lahan (pemilikan tetap + pemilikan sementara) lebih penting dibanding distribusi pemilikan (tetap).

KESIMPULAN

Dalam komunitas petani kakao yang telah mengalami perubahan struktur agraria dari pemilikan kolektif ke pemilikan perorangan ternyata bentuk struktur sosial yang muncul adalah stratifikasi yang semakin timpang.

Mengacu pada penguasaan lahan, struktur sosial komunitas petani kakao disusun oleh tiga lapisan berstatus tunggal dan 4 lapisan berstatus kombinasi, yaitu : 1) petani pemilik, 2) petani pemilik + penggarap, 3) petani pemilik + penggarap + buruh tani, 4) petani pemilik + buruh tani, 5) petani penggarap, 6) petani penggarap + buruh tani, dan 7) buruh tani.

Pada saat penelitian berlangsung, petani tunakisma tidak mutlak maupun tunakisma mutlak sudah muncul di semua komunitas petani di Provinsi Sulawesi Tengah maupun di NAD. Bahkan dalam komunitas petani di Desa Jono Oge Sulawesi Tengah yang berlatar belakang etnis Bugis (pendatang), proporsi petani tunakisma sudah mencapai 34,2% (dari total rumah tangga petani). Berdasarkan analisis *Gini ratio*, ketimpangan pemilikan lahan total sudah mencapai tingkat ketimpangan tinggi (dalam komunitas petani di Desa Jono Oge dan Cot Baroh/Cot

Tunong). Sedang (Desa Tondo), dan tingkat ketimpangan rendah (Desa Ulee Gunong). Bahkan, bila analisis *Gini ratio* diterapkan pada lahan produktif ternyata sebagian besar komunitas petani dimaksud berada pada tingkat ketimpangan Tinggi, kecuali komunitas petani di Desa Cot Baroh/Cot Tunong NAD (tingkat ketimpangan Rendah).

Berlangsungnya perubahan struktur sosial komunitas petani berimplikasi pada meningkatnya differensiasi kesejahteraan dalam komunitas tersebut. Sebagian besar petani di desa-desa penelitian di Provinsi NAD berada pada lapisan miskin. Sementara itu, di desa-desa penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah proporsi lapisan petani miskin dan lapisan petani sedang relatif seimbang. Munculnya lapisan petani dengan status kesejahteraan miskin tidak hanya terjadi pada lapisan petani tunakisma mutlak maupun tunakisma tidak mutlak tetapi juga pada lapisan petani pemilik, terutama pada lapisan petani pemilik yang luas lahan miliknya relatif sempit (kurang dari 2 ha). Berdasarkan analisa *Gini ratio*, ketimpangan penghasilan dan pengeluaran di empat komunitas lokasi penelitian umumnya masih berada pada kategori rendah, kecuali ketimpangan penghasilan di Desa Jono Oge (tergolong Tinggi) dan ketimpangan penghasilan di Desa Tondo (tergolong Sedang).

Hasyim, Wan (1988). *Peasant under Peripheral Capitalism*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hayami; Yuziro & Masao Kikuchi (1987). *Dilema Ekonomi Desa. Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Newman & W. Lawrence (1997). *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon. Boston.

Ray, Christopher (2002). A mode of production for fragile rural economics: the territorial accumulation of form of capital. *Journal of Studies*. 18, 225–231.

Russel & James W. (1989). *Modes of Production in World History*. Routledge. London and New York.

Shanin, Teodor (1990). *Defining Peasant. Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World*. Basil Blackwell. Cambridge.

Wiradi, G. (1984). *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria Dalam Tjondronegoro (Editor) Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*. PT Gramedia. Jakarta.

Yin, Robert K. (2002). *Studi Kasus. Desain dan Metoda*. PT. Raja Grafitia Persada. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perkebunan (2007). *Statistik Perkebunan Indonesia 2003–2006: Kakao*. Direktorat Jenderal BP Perkebunan. Jakarta.
